

INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERNITAS DALAM GERAKAN DAKWAH ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI ACEH*

Arifin Zain

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
<zain.ifinzain@gmail.com>

Maimun

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
<maimun.fdk01@gmail.com>

Maimun Fuadi

Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
<maimun.fuadi75@gmail.com>

Abstrak: Organisasi Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang *tajdid* dan dakwah amar makruf nahi munkar. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Desember 1912 oleh KH Ahmad Dahlan atas dasar keprihatinan sosial, religius dan moral yang disebabkan oleh kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya sampai ke Aceh. Di dalam konteks ke-Acehan, organisasi Muhammadiyah mengalami perkembangan luar biasa. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti keorganisasian, pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya. Namun demikian, dari semua perkembangan yang telah diperoleh, kelihatannya perkembangan dalam bidang dakwah atau amar ma`ruf nahi munkar relatif lamban dan kurang berkembang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah, dan faktor-faktor penghambat gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini dikategorikan kepada dua macam: *Pertama*, sumber data primer yang di dapat dari hasil observasi dan wawancara. *Kedua*, sumber data sekunder meliputi naskah, dokumen dan semua informasi dari kegiatan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai modernitas dalam dakwah Muhammadiyah dilakukan melalui semua kegiatannya, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemikiran dan dakwah. Muhammadiyah juga mengalami sejumlah hambatan pada pelaksanaan internalisasi nilai tersebut mengingat organisasi ini relatif kecil di Aceh.

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-nilai Modernitas, Dakwah dan Muhammadiyah

* Manuskrip ini merupakan hasil sarian dari laporan hasil penelitian penulis dengan judul: "Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Muhammadiyah Aceh", Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2015.

Abstract: Muhammadiyah organization known as an organization engaged in the field of *tajdid* and *da'wah amar makruf nahi munkar*. Muhammadiyah was founded on December 18, 1912 by KH Ahmad Dahlan on the basis of social, religious and moral concerns caused by ignorance, poverty and the backwardness of the *ummah*. In 1927, Muhammadiyah established its branches to Aceh. In the context of the Aceh, Muhammadiyah organization experienced remarkable progress. This development can be seen from several sides, such as organizational, educational, religious, social, economic and cultural. Nevertheless, of all the developments that have been obtained, it seems that developments in the field of *da'wah* or *amar ma'ruf nahi munkar* are relatively slow and underdeveloped. This paper aims to find out the internalization of modernity values in *da'wah* movement, and the factors inhibiting the propagation movement Muhammadiyah organization in Aceh. This research is a field research with qualitative descriptive analysis technique. Sources of research data is categorized into two kinds: First, the primary data source that can be from the results of observation and interview. Secondly, secondary data sources include manuscripts, documents and all information from missionary activities of Muhammadiyah organizations in Aceh. The result of research shows that internalization of modernity values in Muhammadiyah *da'wah* is done through all its activities, such as education, economy, social, thought and *dakwah*. Muhammadiyah also experienced a number of obstacles to the implementation of the internalization of the value given that the organization is relatively small in Aceh.

Keywords: Internalization, Modernity Values, *Dakwah* and Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy di Kauman Yogyakarta. Dahlan berasal dari keluarga muslim yang taat, ayah dan kakeknya dari pihak ibu adalah seorang pegawai mesjid (penghulu) di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, mesjid kemudian dilanjutkan ke Mekkah. Gurunya yang terkenal adalah Syaikh Ahmad Khathib yang juga guru KH. Hasyim Asy`ari.¹

Secara umum, faktor pendukung kelahiran Muhammadiyah berawal dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan

¹Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 250-251.

keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial yang positif, disamping sarat dengan takhayul, bid`ah dan khurafat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.²

Disamping sebagai gerakan sosial keagamaan, organisasi Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan *tajdid*. Perkataan *tajdid* pada asalnya berarti pembaharuan, modernisasi dan sebagainya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperbaharui pengertian kaum muslimin tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam sejati sesuai dengan al-Qur`an dan as-sunnah. Dibandingkan dengan organisasi pembaharuan Islam yang lain, organisasi Muhammadiyah memiliki karakteristik tersendiri, yakni pola pembaharuan yang dilakukan melalui penataan organisasi yang rapi dan terencana. Pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah diaplikasikan dalam kehidupan sosial yang nyata. Secara umum amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.³

Meskipun pendekatan Muhammadiyah bermacam-macam sesuai dengan aktivitasnya, Muhammadiyah sendiri menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, yang berakidah Islam yang bersumber pada al-Quran dan as-sunnah. Jadi, Muhammadiyah mempunyai jati diri: gerakan Islam, gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta gerakan berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan sunnah. Jati diri ini berimplikasi pada ruang gerak dan aktivitasnya dalam multi aspek kehidupan, sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat.⁴

Islam yang ditawarkan Muhammadiyah adalah Islam yang sistemik, yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam yang bercorak demikian itu adalah hasil dari pemahaman agama yang berdasarkan pada al-Quran dan as-sunnah dengan menggunakan *mantiq*. Aktualisasi Islam yang bercorak demikian menuntut adanya aksi sehingga bisa memberi rahmat dan kenikmatan hidup bagi manusia tanpa terkotak-kotak pada predikat muslim atau non muslim; dan menuntut adanya nilai dakwah amar makruf nahi munkar. Dakwah semacam itu merupakan konsekuensi logis dari misi Islam yang ditawarkan. Dalam konteks dakwah amar makruf nahi munkar

²Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, hal. 251.

³Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, hal. 253.

⁴Syaifulloh, *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hal. 2.

inilah tampak keseluruhan amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perilaku politiknya.⁵

Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang di luar Jawa, seperti Bengkulu, Banjarmasin dan Amuntai, dan pada tahun 1929 pengaruhnya tersebar ke Makassar dan Aceh. Para muballigh dikirim ke daerah-daerah tersebut dari Jawa atau dari Minagkabau untuk menyebarkan cita-cita Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah tidak hanya organisasi yang terfokus di Yogyakarta atau di pulau Jawa, tetapi telah menjadi gerakan yang meliputi seluruh nusantara. Muhammadiyah sebagai gerakan religius-sosial tidak hanya berkisar pada bidang pendidikan saja. Tujuan gerakan ini adalah pemurnian Islam dari berbagai kepercayaan dan praktik yang bersifat takhayul tidak bisa lagi diwujudkan hanya melalui bidang pendidikan. Bidang-bidang lain di luar pendidikan menjadi perhatian Muhammadiyah sebagai sarana gerakan dakwahnya.⁶

Di dalam konteks ke-Acehan organisasi Muhammadiyah sendiri mengalami perkembangan luar biasa. Perkembangan ini dapat dilihat dari banyak sisi, seperti keorganisasian, pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya. Secara organisasi, disamping keberadaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, juga adanya Pimpinan Daerah di tiap kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa/gampong.

Luasnya jangkauan Muhammadiyah dan banyaknya kegiatan yang dilakukan di Aceh menunjukkan betapa seriusnya organisasi ini dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah Aceh saat ini telah memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, hingga Universitas yang mengelola pendidikan tinggi, mulai strata D-3 hingga program Magister. Bahkan pada strata satu dapat dikatakan memiliki keunggulan yang cukup baik dengan mendapatkan nilai akreditasi B pada prodi-prodi yang mereka kelola. Dalam bidang sosial lembaga ini memiliki panti asuhan yang siap menampung anak-anak dari kalangan fakir, miskin dan anak-anak telantar agar dapat hidup layak, mendapatkan perlindungan dan pembinaan rohani serta memperoleh pendidikan atas tanggungan Muhammadiyah. Dari sudut pandang ekonomi, Muhammadiyah memiliki lembaga keuangan mikro yang siap memberikan bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil atau masyarakat yang membutuhkannya.

⁵ Syaifullah, *Gerakan Politik*, hal. 3.

⁶ Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 53.

Namun demikian, dari semua perkembangan yang telah diperoleh organisasi Muhammadiyah di atas, agaknya perkembangan dalam bidang dakwah atau amar ma`ruf nahi munkar relatif lamban dan kurang berkembang. Berdasarkan observasi awal, apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang ini relatif sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya di Aceh. Tidak ada perkembangan yang berarti, baik dari jenis kegiatan, pengelolaan kegiatan, media serta materi yang diberikan. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaannya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah dan amar ma`ruf nahi munkar dan sebagai lembaga pembaharu (*mujaddid*) maka Muhammadiyah perlu melakukan reformasi dan modernisasi terhadap gerakan dakwah yang ada dalam berbagai dimensi.

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti berpendapat bahwa penting dilakukan penelitian tentang hal tersebut dalam rangka menemukan jalan pemecahannya. Dengan demikian, fokus kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh, faktor-faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai modernitas dalam pergerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh.

Menurut penulis, kajian ini penting dilakukan karena akan menginformasikan dan menjelaskan internalisasi nilai-nilai modernitas dalam pergerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh, termasuk faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Pada sisi lain, secara praktis kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan pemikiran bagi Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Aceh dalam melakukan modernisasi terhadap gerakan dakwah ke depan sehingga lebih berdaya dan berhasil guna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Untuk mendukung penelitian lapangan ini digunakan juga penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap berbagai dokumen, seperti buku, Anggaran Dasar dan Program Kerja dalam bidang Dakwah Muhammadiyah Aceh. Sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, sumber data penelitian ini dikategorikan kepada dua macam, yaitu: *Pertama*, sumber data primer, di dapat dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. *Kedua*, sumber data sekunder meliputi naskah, dokumen dan semua informasi dari kegiatan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh.

Tehnik pengumpulan datanya dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara mendalam (*in-dept interview*) dan telaah dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data dari subjek penelitian yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan secara mendalam guna mendapatkan data yang detil tentang permasalahan yang sedang diteliti. Sementara telaah dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang dakwah organisasi Muhammadiyah. Di antara dokumen yang diteliti adalah buku-buku yang relevan, jurnal, hasil penelitian-penelitian yang dapat memebrikan informasi tentang kegiatan dakwah organisasi Muhammadiyah Aceh.

Berangkat dari tehnik pengumpulan data di atas, maka analisis terhadap data penelitian harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terpisah. Analisis hasil wawancara dan telaah dokumentasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Program Kerja Organisasi Muhammadiyah Aceh

a. Sejarah Muhammadiyah Aceh

Organisasi Muhammadiyah pertama sekali masuk ke Aceh (Kutaraja) pada tahun 1923; dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi S. Djaja Suekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh. Karena keadaan waktu itu belum memungkinkan untuk mendirikan sebuah cabang, karena personalia pengurus belum ada maka baru dapat didirikan pada tahun 1927. Pendirian ini mendapat bimbingan langsung dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama A. R. Soetan Mansur. Organisasi ini berdiri secara resmi di Kutaraja dan pimpinannya dipilih R. O. Armadinata seorang dokter gigi yang waktu itu bertugas di Kutaraja. Sebagai konsul pertama dijabat oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong, pegawai kantor pusat kas-kas kenegerian Kutaraja. Pada tahun 1928 organisasi ini selanjutnya mendirikan perkumpulan wanita, yakni Aisyiyah, yang mengurus hal-hal yang terkait dengan kepentingan dan kemajuan kaum wanita; sebuah organisasi kepanduan yang bernama *Hizbul Wathan* dan didirikan pula satu lembaga pendidikan HIS.⁷

⁷ Rusdi Sufi, *Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik Pada Masa Kolonial di Aceh*, dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, (Banda Aceh; Gua Hira, 1995), hal. 121. Baca pula: M. Hassan Su'ud, *Kontribusi Muhammadiyah Bagi Pembangunan Daerah Istimewa Aceh*, dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, hal. 152.

Di dalam perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang pada beberapa kota lain di Aceh. Di Sigli didirikan pada tanggal 1 Juli 1927, Lhokseumawe pada bulan Agustus 1927 dengan mendapat dukungan sepenuhnya dari Ulee Balang setempat. Di Kuala Simpang pada tanggal 7 Oktober 1928, Langsa pada tanggal 29 Oktober 1928, Takengon pada bulan Mei 1929 dan Bireuen, tahun 1928. Cabang-cabang Muhammadiyah tersebut diatas sebagian besar berlokasi di wilayah pantai timur Aceh. Dengan dalih politik pemerintah Hindia Belanda di Aceh melarang Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya di wilayah pantai barat Aceh. Namun demikian disana (Kota Tapaktuan) terdapat sebuah organisasi yang bernama Sumatra Thawalib yang mendapat pengaruh langsung dari perguruan Thawalib Sumatera Barat yang anggota-anggotanya juga sebagai pendukung Muhammadiyah. Dalam perkembangan lebih lanjut, sesudah diadakan pendekatan dan persetujuan dengan pemerintah, oleh konsul Muhammadiyah sendiri (Teuku Hasan Meuraxa yang menggantikan Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong), maka sejak pertengahan tahun 30-an, pemerintah Hindia-Belanda telah menyetujui pendirian sebuah cabang Muhammadiyah di Calang (salah satu kota di pantai Barat Aceh); dan diikuti pula dengan didirikannya sebuah lembaga pendidikan HIS.⁸

Atas inisiatif perkumpulan Muhammadiyah cabang Lhokseumawe maka pada tanggal 25 Desember 1928 diadakan suatu rapat umum dengan mengambil tempat di gedung bioskop kota tersebut. Rapat ini dihadiri oleh utusan-utusan Muhammadiyah dari Kutaraja, Sigli, Langsa, Kuala Simpang dan juga Sumatera Barat; serta dari utusan perkumpulan *Al-Irsyaad* cabang Lhokseumawe. Tujuan rapat ini khusus untuk membahas masalah ordonansi guru sehubungan dengan masa itu, rapat telah memutuskan untuk mengajukan suatu unsur kepada pemerintah agar ordonansi guru tersebut dicabut.⁹

Pada bulan Oktober 1928 di wilayah pantai Barat Aceh datang seorang tokoh Muhammadiyah asal Minang Kabau, Muhammad Zain Jambek. Tujuannya untuk menjajaki kemungkinan didirikannya cabang Muhammadiyah di kota Tapaktuan; dan memberikan serangkain ceramah di wilayah itu, namun karena dikhawatirkan akan terjadi agitasi politik, maka pemerintah melarang kegiatan Muhammad Zain Jambek di daerah dan juga melarang Muhammadiyah membentuk cabangnya di wilayah pantai Barat Aceh. Hal ini dikaitkan dengan situasi politik di wilayahnya yang waktu itu masih dianggap belum stabil oleh pemerintah. Di sana masih terjadi serentetan perlawanan bersenjata terhadap

⁸ Rusdi Sufi, *Perkembangan Muhammadiyah*, hal. 121-122.

⁹ Rusdi Sufi, *Perkembangan Muhammadiyah*, hal. 128.

Belanda. Jika Muhammadiyah juga terdapat disana, pemerintah khawatir pengikut-pengikut organisasi ini akan terpengaruh ikut memerangi Belanda, dan juga diperkirakan akan besar kemungkinan timbulnya apa yang diistilahkan oleh Belanda, *Atjeh Moorden* (pembunuhan-pembunuhan kas Aceh) diwilayah itu.¹⁰

Muhammadiyah di Aceh sejak berdirinya sampai pada tahapan-tahapan berikutnya, disamping mengalami perkembangan yang semakin besar juga berhadapan dengan berbagai masalah internal dan eksternal. Masalah internal dapat wujud dalam bentuk masalah dalam organisasi Muhammadiyah sendiri dan masalah yang berhadapan dengan misi pembaharuan Islam yang dibawanya kadang-kadang bertuburukan dengan nilai adat yang berbaur dengan nilai ritual keagamaan yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat Islam yang telah duluan ada di sesuatu tempat.¹¹

Kehadiran Muhammadiyah di Aceh tidaklah disambut dengan tangan terbuka, dimanapun ia muncul selalu ada tantangan dan rintangan. Hal ini menurut Yunus adalah wajar-wajar saja, karena Muhammadiyah ingin menembus kejumudan, khurafat dan bid'ah yang telah terbentuk dan tersebar selama berabad-abad. Berbagai macam kenduri seperti kenduri sawah, kenduri laut, kenduri 100 hari dan kenduri kematian, pembacaan qunut pada shalat subuh dan sebagainya merupakan obyek kritikan dari da'i Muhammadiyah Aceh. Tantangan eksternal Muhammadiyah, diantaranya berhadapan dengan pihak-pihak tertentu lainnya yang ingin mengembangkan missinya dan berupaya memperkecil populasi umat Islam di Aceh. Masalah ini secara tersirat sebenarnya adalah identik dengan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam secara keseluruhan di Indonesia.¹²

Jika merujuk kepada Anggaran Dasar Muhammadiyah BAB III tentang Maksud dan Tujuan, serta Usaha, pasal 6 menyebutkan: Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pasal 7 dalam ayat 1 menyebutkan: untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.¹³

Berdasarkan Anggaran Dasar di atas dapat dipahami bahwa dakwah amar ma'ruf dan *tajdid* merupakan salah satu amal usaha terpenting Muhammadiyah yang dapat menyusup dalam setiap dimensi kegiatan Muhammadiyah atau

¹⁰ Rusdi Sufi, *Perkembangan Muhammadiyah*, hal. 128-129.

¹¹ M. Hassan Su'ud, *Kontribusi Muhammadiyah*, hal. 152-153.

¹² M. Hassan Su'ud, *Kontribusi Muhammadiyah*, hal. 154.

¹³ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah ke-37 Muhammadiyah Aceh*, (Banda Aceh: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, 2010), hal. 43.

dilakukan secara terpisah dalam kegiatan secara mandiri. Kenyataannya, bidang-bidang yang relatif berkembang selama ini adalah bidang pendidikan dan sosial. Idealnya semua bidang kegiatan harus berjalan sering dan memiliki kemajuan yang berimbang.

b. Program Kerja Muhammadiyah Aceh

Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh No: 03/Kep/II.O/B/2011, disebutkan bahwa Muhammadiyah Aceh Periode 2010-2015 memiliki program dalam beberapa bidang, yaitu: Bidang Pengembangan Organisasi, meliputi Program Tertib Administrasi, Program Prioritas Muhammadiyah Aceh dan Rekomendasi yang bersifat Internal dan Eksternal Muhammadiyah.

Program prioritas Muhammadiyah meliputi: Program *Tarjih, Tajdid* dan Pemikiran Islam, Program Bidang Tabligh, Pustaka dan Informasi, Program Bidang Pendidikan, Madrasah dan Dayah, Program Bidang Pengkaderan, Seni Budaya dan Olahraga, Program Bidang Pelayanan Kesehatan Umum, Program Bidang Pelayanan Sosial dan Perlindungan Anak, Program Bidang Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Program Bidang Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan (LPPK) serta Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah.¹⁴

Program Bidang Tabligh, Pustaka dan Informasi meliputi: membuat peta dakwah; menumbuhkembangkan kembali kesadaran ber-Muhammadiyah sehingga dapat mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan materialistis; mengefektifkan pengajian di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting; membentuk kelompok (Korps/Ikatan) Mubaligh Muhammadiyah dan mengfungsikannya dengan baik; menyelenggarakan pelatihan kader dakwah; menyelenggarakan pendidikan Imam dan Khatib; mengusahakan penempatan da'i-da'i Muhammadiyah di daerah-daerah terpencil dan atau rawan gangguan aqidah; menjadikan pesantren Ihyaussunnah Lhokseumawe sebagai pilot project pesantren wilayah; membuat jaringan informasi dakwah dengan menggunakan media elektronik; merintis penyelenggaraan KBIH; mendirikan pustaka di Sekretariat PWM dan pustaka Mesjid; menyusun buku sejarah Muhammadiyah di daerah-daerah; mengumpulkan dan mendokumentasikan skripsi dan thesis, disertasi tentang Muhammadiyah Aceh; menyusun data base profil, kegiatan, amal usaha Muhammadiyah; membuat website Muhammadiyah; dan mengusahakan terbitnya

¹⁴ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, *Tanfidz Keputusan Musyawarah*, hal. 7-14.

bulletin Muhammadiyah atau penerbitan lainnya, sebagai media dakwah dan informasi.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah Aceh

Berbicara tentang modernitas sangat terkait dengan rasionalitas. Modernitas dibangun berdasarkan rasionalitas bukan atas supranatural, dan alat-alat produksinya menggunakan teknologi, bukan lagi mengandalkan kekuatan alam, manusia dan sebagainya. Dalam pembahasan kemodrenan, kata yang biasa digunakan, yaitu *modern*, *modernitas*, *modernisme* dan *modernisasi*. Secara literal *moderen* berarti: “terbaru, mutakhir, sikap dan cara pikir serta cara tindak sesuai dengan ketentuan zaman”. *Modernitas* berarti kemodernan. *Modernisme* berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin-doktrin tradisional sesuai dengan perkembangan zaman, sejarah dan ilmu pengetahuan. Sedangkan *modernisasi* adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Padanan kata ini dalam bahasa Indonesia adalah pembaharuan. Pembaharuan berarti sesuatu yang belum pernah ada (dilihat), atau belum pernah didengar.¹⁶ Semua kegiatan memperbaharui, menciptakan yang baru, memperbaiki, menata kembali, dan mengubah, disebut pembaharuan.¹⁷ Dalam bahasa Arab sering digunakan kata *tajdid* yang juga berarti pembaruan.¹⁸

Nilai-nilai modernitas akan terwujud jika proses modernisasi telah ditanamkan sebelumnya. Proses modernisasi merupakan suatu proses aktivitas ke arah kemajuan, yaitu perubahan dan perombakan secara asasi susunan dan corak dalam suatu masyarakat dengan ciri berikut: dari statis ke dinamis, dari tradisional ke rasional dan dari feodal ke kerakyatan, dengan jalan mengubah cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi segala hal dan tata cara semaksimal mungkin.¹⁹ Fazlur Rahman mendefinisikan modernisasi sebagai proses usaha tokoh-tokoh muslim dalam melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisme yang berlangsung di dunia Islam.²⁰

¹⁵ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, *Tanfidz Keputusan Musyawarah*, hal. 7-8.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 751.

¹⁷ Ris`an Rusli, *Pembaharuan pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 13.

¹⁸ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), hal. 174.

¹⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 179-180.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal. 215-216.

Modernitas sebagai suatu hasil pemikiran manusia, membawa sejumlah nilai yang memiliki pengaruh terhadap manusia. Seorang pemikir modern, Alex Inkeles pernah merumuskan nilai-nilai fundamental modernitas itu sebagai berikut: Kecenderungan menerima gagasan baru, kesediaan buat menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lampau, rasa ketepatan waktu yang lebih baik, keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung, menghargai kekuatan ilmu teknologi dan keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan.²¹ Nilai-nilai fundamental modernitas dapat dirumuskan: memiliki tanggung jawab pribadi dan sikap jujur; menunda kesenangan sesaat demi kesenangan yang abdi; pemanfaatan waktu dan etos kerja; keyakinan bahwa keadilan dapat diratakan; penghargaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan; memiliki visi dan perencanaan yang tepat tentang masa depannya; dan sangat menjunjung tinggi bakat dan kemampuan, serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi.²²

Dengan demikian, modernitas atau kemodernan merupakan suatu pembaruan pola pikir, cara pandang, sikap hidup manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kemodernan dan bergerak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kemodernan seorang individu atau satu kelompok masyarakat bukan diukur karena berada atau hidup pada zaman modern, melainkan apakah cara pandang, pola pikir dan sikap hidup yang mereka lakukan sejalan dengan prinsip-prinsip modernitas.

Melihat amal usaha dan gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah Aceh, terutama dalam kaitannya dengan ciri-ciri modernitas, apakah yang telah dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah telah sesuai dengan kriteria nilai-nilai kemodernan? Di sini dapat dikatakan bahwa, amal-amal usaha organisasi Muhammadiyah, terutama dalam gerakan dakwahnya dibangun atas dua hal, yaitu berdasarkan rasionalitas dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah sesuai dengan suasana kemoderenan itu sendiri. Jadi di Muhammadiyah dalam amal usahanya tidak lagi berpola dengan kaidah tradisional.²³ Untuk lebih jelas, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk internalisasi nilai-nilai modernitas dalam amal usaha dan gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah Aceh:

²¹ Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Prenada, tt), hal. 118.

²² Syahrin Harahap, *Islam Modernitas*, hal. 119.

²³ Hasil wawancara dengan Aslam Nur, pada tanggal 15 Agustus 2015.

a. Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus utama Muhammadiyah, baik untuk tingkat Aceh maupun pada tingkat nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi ini memiliki aset yang demikian besar dalam bidang pendidikan anak bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menyebar dari barat sampai ke timur Indonesia, mulai tingkat desa sampai kota metropolitan. Lembaga-lembaga pendidikan organisasi ini merambah pada semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai tingkat PAUD hingga universitas, mulai pendidikan umum, agama maupun pendidikan kejuruan, seperti SMK, akademi kesehatan dan perindustrian lainnya.

Menurut Muhammadiyah, membangun lembaga-lembaga pendidikan itulah inti kemoderenan. Sekarang ini, secara nasional Muhammadiyah telah mempunyai 70.000 lembaga pendidikan walaupun dalam segi kualitas di sana sini masih ditemukan belum berjalan dan dikelola dengan baik dan perlu peningkatan terus menerus.²⁴

Nilai-nilai modernitas dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya terlihat dalam proses pendirian lembaga pendidikan pada semua jenjang guna memncerdaskan anak bangsa, namun pekerjaan saat ini adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan tersebut mampu eksis dan memberikan sebuah konsep yang baik bagi negara. Sebagai contoh: bagaimana universitas Muhammadiyah mampu memberikan sebuah konsep kepada negara, umpamanya di bidang ekonomi. Bagaimana konsep ekonomi bisa dikelola dengan baik menurut model yang diinginkan oleh Muhammadiyah dan bisa terhindar dari korupsi, inilah yang dikerjakan. Kegiatan ini tentunya tidak akan kelihatan pada universitas Muhammadiyah Aceh, karena Muhammadiyah di Aceh masih kecil. Namun pada tingkat Universitas Malang, Purwokerto, Yokyakarta hal ini telah mereka pikirkan. Bagaimana memperbaiki dan membangun negeri ini agar lebih berkualitas, jadi mereka memberikan sumbangan pikiran, baik disampaikan secara langsung kepada pemerintah maupun melalui tulisan-tulisan lewat publikasi. Hal inilah yang dikatakan dengan dakwah secara organisasi dan kelembagaan.²⁵

Sebagai salah satu organisasi yang mengelola lembaga pendidikan swasta, maka Muhammadiyah dituntut untuk terus agresif dan membenahi semua sistim pendidikannya. Agresif dalam arti organisasi ini harus berupaya meningkatkan kualitas akademik, baik bidang administrasi, kualitas sarana dan prasarana,

²⁴ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

²⁵ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

kualitas dosen serta kualitas mahasiswanya agar dapat bersaing dan bersanding dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya maupun dengan lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Disisi lain, Muhammadiyah-pun dituntut untuk bersaing dari sisi pembiayaan dalam arti pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang murah. Bagimanapun, Muhammadiyah selama ini sudah dikenal oleh masyarakat bukan hanya sebagai organisasi agama tapi juga sebagai organisasi sosial, sehingga nilai-nilai sosial ini harus tetap dipertahankan.

Di tengah persaingan yang demikian ketat, Muhammadiyah terus berusaha mempertahankan lembaga pendidikannya, agar tetap eksis dalam masyarakat. Kuatnya daya tahan dan daya saing ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pendidikannya di Aceh yang terus meningkat, bahkan pada beberapa bidang menjadi favorit baik bagi para siswa maupun di kalangan mahasiswa. Padahal dalam kondisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah membatasi bantuan pendidikan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta, bahkan sebagian memilih untuk dinegerikan karena keterbatasan dana, Muhammadiyah tetap dapat mempertahankan lembaga pendidikannya.

Terkait dengan sektor pendidikan ini, mana saat ini sekolah swasta di Aceh yang dapat bertahan selain sekolah Muhammadiyah? Sekolah-sekolah swasta seperti Safiatuddin, Mughayat Syah, Insyafuddin, Adi Dharma, dan lainnya, mana yang mampu bertahan? Muhammadiyah dengan tertatih-tatih berusaha tetap mempertahankan sekolahnya dalam kondisi pemerintah yang menegerikan sekolah-sekolah swasta. Dahulu, sekolah-sekolah swasta tersebut sangat besar, namun sekarang? Di saat kebijakan pemerintah daerah tidak memberikan subsidi kepada lembaga pendidikan swasta, sekolah-sekolah Muhammadiyah terus bertahan.²⁶

Ada hal menarik tentang dipilihnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi putra-putri Aceh. Walaupun di satu sisi Muhammadiyah disorot dari sisi ibadahnya, namun pada sisi pendidikan kehadirannya sangat diharapkan. Sebagaimana diketahui bahwa yang masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya warga Muhammadiyah saja, namun secara umum berasal dari warga yang bukan anggota Muhammadiyah. “Masyarakat Aceh lebih memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah dibandingkan dengan universitas swasta yang lain, demikian pula halnya dengan lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah. Sebagai contoh di Blang Pidie, ada satu sekolah Islam terpadu milik Muhammadiyah yang menjadi unggulan, yang disana terdapat anak salah seorang tokoh PERTI yang memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Begitu pula dengan AKBID

²⁶ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

Muhammadiyah di Banda Aceh yang diminati oleh anak-anak Aceh untuk melanjutkan kuliah mereka. Jadi tidak seluruhnya benar tentang adanya persepsi miring terhadap Muhammadiyah”.²⁷

Terkait dengan hal tersebut, agaknya masyarakat Aceh ini cerdas, mereka sudah mampu melihat mana yang berkualitas dan yang tidak berkualitas, terlepas dari embel-embel di belakangnya. Realitasnya dapat dikatakan bahwa Aceh dikuasai oleh dayah dari sisi pemahaman keagamaan, namun dari sisi lainnya masyarakat Aceh sangat modern. Sebagai contoh, pada Pemilu Pertama tahun 1955, di Aceh yang menang adalah partai Masyumi (padahal mayoritas Masyumi adalah warga Muhammadiyah), bukan Perti atau NU. Begitu juga setelah reformasi, yang menang Pemilu adalah Partai Amanat Nasional, pada hal Amin Rais adalah tokoh Muhammadiyah.²⁸

Jika dilihat dalam amal usaha bidang pendidikan, maka nilai-nilai modernitas dalam pendidikan Muhammadiyah ditujukan untuk pencerdasan dan pencerahan umat. Muhammadiyah memberikan pemahaman dan pengamalan agama yang benar kepada masyarakat, agar jauh dari khurafat, bid'ah dan sebagainya. Di mana letak nilai-nilai modernnya di sini? Jika dahulu hanya memakai sarung, sekarang menggunakan celana, dasi, dan sebagainya. Muhammadiyah juga melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam amal usahanya. Misalnya dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas, akan tetapi juga memberikan nilai-nilai intelektualitas kepada kader-kader umat, masyarakat dan bangsa yang nantinya bisa melanjutkan pembangunan bangsa.²⁹

Hal di atas senada dengan pernyataan pimpinan Muhammadiyah Aceh lainnya yang menyatakan bahwa berbicara tentang modernitas sangat terkait dengan rasionalitas. Modernitas dibangun berdasarkan rasionalitas bukan atas supranatural. Kedua, alat-alat produksinya menggunakan teknologi, bukan lagi mengandalkan kekuatan alam, manusia dan sebagainya. Di sini dapat dikatakan bahwa, amal-amal usaha Muhammadiyah dibangun atas dua hal itu, yaitu rasionalitas dan teknologi. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah sesuai dengan suasana kemoderenan itu sendiri. Jadi di Muhammadiyah dalam amal usahanya tidak lagi berpola dengan kaidah tradisional.³⁰

Intensifnya Muhammadiyah menggarap sektor pendidikan karena melalui pendidikanlah harga diri, nasib dan martabat seorang anak manusia serta martabat

²⁷ Hasil wawancara dengan Aslam Nur, pada tanggal 15 Agustus 2015.

²⁸ Hasil wawancara dengan Aslam Nur, pada tanggal 15 Agustus 2015.

²⁹ Hasil wawancara dengan Muharrir Asy'ary, pada tanggal, 11 Agustus 2015.

³⁰ Hasil wawancara dengan Aslam Nur, pada tanggal 15 Agustus 2015.

suatu bangsa dapat ditingkatkan. Dengan pendidikan maka intelektualitas, karakter, wawasan, dan sikap manusia dibangun sehingga memiliki tanggung jawab baik terhadap dirinya, bangsa, negara, masyarakat dan yang paling penting tanggung jawab kepada Tuhannya. Pendidikan akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan pada saatnya nanti akan tampil menjadi pemimpin bangsa yang sanggup melakukan perubahan dalam semua sisi kehidupan.

Muhammadiyah menyadari bahwa lembaga-lembaga pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan kader Muhammadiyah ke depan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu pusat kader yang akan memperkokoh gerak Muhammadiyah yang makin meluas ke segala bidang dan dapat bersaing di semua level bersama lembaga-lembaga pendidikan umum. Lembaga-lembaga pendidikan umum Muhammadiyah dari TK (Taman Kanak-Kanak) sampai Perguruan Tinggi, perlu lebih dikembangkan sesuai dengan misi K.H. Ahamad Dahlan ketika menggagas pendidikan Muhammadiyah.

Hal yang diharapkan Muhammadiyah dari lembaga-lembaga pendidikannya adalah dihasilkannya kader yang menghayati misi Muhammadiyah yang kian meluas jangkauannya dan para kader itu memiliki ilmu agama yang terpadu dengan ilmu umum serta memiliki kepribadian Muhammadiyah yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, sehingga sebagaimana diistilahkan oleh Kuntowijoyo, kader Muhammadiyah mampu memadukan imam dengan kemajuan dalam kehidupannya, dan merasa sanggup hidup di tengah-tengah peradaban modern sebagai saksi sejarah.

b. Bidang Pemikiran/Pembaharuan

Para penulis atau peneliti tentang Islam, seperti James L. Peacock, Mitsuo Nakamura, Clifford Geertz, Robert Van Neil, Harry J. Benda, George T. Kahin, Alfian, Deliar Noer, dan lain-lain, menggolongkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pembaharu, modern, modernis, dan modernisme Islam, yang gerakannya bersifat kultural dan lebih berkonsentrasi pada gerakan dakwah dan *tajdid*.³¹ Bahkan menurut mereka, modernisme yang ditampilkan oleh

³¹Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996); Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989); Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2002); Ahmad Syafii Maarif, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Sipress, 1990); James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam*, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986); Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*, (Institute of Southeast Asian Studies, 1983).

Muhammadiyah berbeda dari arus modernisme Islam yang bergulir di dunia Islam umumnya yang cenderung mengeras dalam ideologi salafiyah atau revivalisme Islam yang kaku.

Ahmad Dahlan sendiri mendefinisikan Muhammadiyah sebagai Islam yang berkemajuan. Definisi sederhana ini dapat dilihat sebagai sebuah representasi dari karakter dasar pergerakan Muhammadiyah. Gagasan Islam yang berkemajuan diimplementasikan Dahlan dalam sejumlah tindakan yang bertolak belakang dengan pemahaman Islam yang pada umumnya berkembang pada masa itu. sebagai contoh, ketika kembali dari Timur Tengah, Dahlan terlibat dalam sebuah perdebatan dengan kiai senior di Kauman Yogyakarta ketika ia melakukan koreksi terhadap arah kiblat. Gagasan Dahlan ditolak oleh seniorinya. Ia kemudian mendirikan suraunya sendiri dan mulai mengajarkan gagasan-gagasan reformasinya.³²

Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaruan Islam pertama di Indonesia, ini dibuktikan pada amal usaha nyata. Amal usaha Muhammadiyah secara praktis menunjukkan dimensi modernis. Sementara pada tingkat ideologis organisasi ini tetap menjadikan kalam (teologi) sebagai ruh yang menggerakkan amal praksis tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Arbiyah Lubis bahwa teologi Muhammad Abduh yang rasional karena lebih dekat pada sistem teologi Mu'tazilah, sedangkan teologi Muhammadiyah adalah teologi tradisional karena lebih dekat pada sistem teologi Asy'ariah.³³

Klaim modernis Muhammadiyah ini telah dijelaskan oleh Deliar Noer bahwa organisasi ini disebut sebagai organisasi yang berpaham modernis, rasional, dan gerakan pembaruan yang lebih merujuk pada manajemen organisasi yang mengadopsi model organisasi modern (Barat). Akan tetapi, dalam tesis Noer tersebut Azra justru bertanya – sebagaimana dikutip oleh Jurdi – dalam bagian mana Muhammadiyah disebut modernis. Azra pun berpendapat bahwa Muhammadiyah hanya berpaham modernis pada tingkat praktis, sementara pada tingkat ideologis Muhammadiyah masih menganut aliran Asy'ariah, yang berarti praktik ritual peribadatnya sama saja dengan yang dilakukan oleh warga Nahdatul Ulama (NU) yang disebut tradisional.³⁴ Pendapat ini agak mengagetkan untuk sementara kalangan Muhammadiyah yang berada di wilayah, daerah, cabang dan ranting yang menganggap organisasinya modernis, baik yang

³²Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1902-1942*, (London: Oxford University Press), hal. 72

³³Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik : Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 249.

³⁴Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, hal. 250-251.

berkaitan dengan amal usahanya maupun dalam pemahaman keagamaannya (ideologi). Padahal, yang tampak hanya tingkat amal sosialnya saja yang modernis.³⁵

Terlepas dari pro dan kontra di atas, berikut akan dikemukakan dua contoh tentang pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammadiyah.

Pertama, tentang penafsiran ayat al-Qur'an surat an-Nisa' : 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Selama ini kata *athî'ullâh* dipahami dengan makna Allah, lalu representasinya adalah al-Qur'an, jadi *athî'ullâh* adalah *athî'u al-Qur'ân*. *Athî'u rasul* adalah Nabi Muhammad ketika dia hidup, namun setelah nabi wafat representasinya adalah as-sunnah. Sedangkan *ulil amri* dipahami sebagai penguasa secara personal, seperti khalifah Abu Bakar, setelah ia wafat berpindah kepada Umar, kemudian Usman, dan seterusnya. Dalam konteks sekarang, ulil amri bisa dipahami sebagai presiden, gubernur dan seterusnya. Akan tetapi, Muhammadiyah dalam memahami kata *ulil amri* adalah sebagai sistem yang mengatur. Jadi representasinya bukan orang (person) tetapi sistem. Untuk konteks Indonesia, sistem (*ulil amri*) itu adalah Undang-Undang 1945-NKRI. Jadi, jika Presiden melawan Undang-Undang Dasar maka dia bukan ulil amri, dan pemerintah harus diganti jika menyalahi sistem. Harus ditolak siapapun yang melawan dan melanggar sistem. Kepatuhan bukan kepada pemerintah, tetapi kepada sistem (undang-undang). Hal ini dalam Muktamar Muhammadiyah di Makasar diteguhkan dengan pengakuan kepada Indonesia sebagai *Darul Aqli wa Shahada* - itulah sistem - atau negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan realita. Artinya di sini kita hidup, disini kita lahir, itu tidak bisa ditolak. Orang Indonesia tidak bisa mengaku sebagai orang Arab, atau menolak sebagai orang yang lahir di Aceh, orang yang lahir di Kalimantan misalnya, tidak bisa ditolak dan mesti mengakuinya. Harus mengakui bahwa kita ada di negeri tropis bukan di negeri banyak musim atau hidup di negeri banyak banjir bukan di negara kering seperti Arab, itulah shahadahnya. Demikian realita dan faktanya yang mesti diterima dan diteguhkan dengan *Darul Aqli* bahwa adanya kesepakatan bahwa kita hidup dalam NKRI.³⁶

³⁵ Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, hal. 251.

³⁶ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

Bagi Muhammadiyah, menafsirkan al-Qur'an dan sunnah untuk keperluan sekarang harus dalam kerangka NKRI, yang oleh teman-teman di NU disebut sebagai *Islam Nusantara*. Hal ini merupakan perubahan pemikiran, pembaharuan pemikiran tersebut merupakan tajdid dan itulah dakwahnya. Muhammadiyah dalam hal ini lebih banyak menggunakan kata-kata ilmiah, karena Muhammadiyah memang ingin menjadi modern. Jadi modern harus dengan ilmu bukan dengan budaya nusantaranya, tetapi dengan pengetahuannya, sehingga istilah-istilah yang digunakan lebih banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bahwa yang dikejar adalah kemodernan bukan budaya nusantaranya, walaupun isinya berasal dari budaya nusantara, tetapi tidak melalui budaya nusantara melainkan melalui kajian-kajian ilmiah.³⁷

Kedua, Muhammadiyah sejak awal telah menggagas bagaimana kalender Islam Internasional bisa diberlakukan. Umpamanya, tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Rabu yang bisa berlaku di seluruh dunia. Hal ini sudah dibuat sebelumnya, bukan harus ditentukan pada malam Hari Raya. Jadi harus dibuat sebuah kalender yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara agama yang berlaku secara global/ mendunia. Hal ini sudah dikerjakan oleh sebuah badan independen swasta yang berpusat di Maroko, dibiayai oleh pemerintah Maroko, yang anggotanya terdiri dari sepuluh badan organisasi dunia yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Perencanaan ini sudah dibuat sejak 40 tahun yang silam.³⁸

Tidak mungkin di dunia modern seperti ini tidak memakai hisab, umpamanya begini, jika seseorang memakai penanggalan hijrah seperti Arab Saudi, yang membeli tiket pesawat. Jika pada tanggal 1 Syawal dia pergi dari Jeddah jatuh pada hari Rabu. Bagaimana kalender ini dipakai jika ketika sampai ke Turki maka tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Kamis? atau lebih parah lagi jika 1 Syawal adalah pada hari Selasa?, padahal dia berangkat pada hari Rabu tanggal 1 Syawal. Hal ini bisa membingungkan. Jadi tidak mungkin membuat sebuah kalender dunia berdasarkan penanggalan hijrah jika tidak memakai Hisab. Inilah contoh tajdid dari pemahaman yang dilakukan Muhammadiyah. Perbedaan tanggal Hari Raya bagi Muhammadiyah sangat kecil sekali, yang dibicarakan oleh Muhammadiyah adalah, kalender Islami yang dapat berlaku diseluruh dunia dan bukan sekedar ditulis. Saat ini, Indonesia mempunyai kalender, akan tetapi tanggal 1 Syawal seperti tertulis di kalender dapat diubah pada malam tertentu, bisa dimundurkan satu hari atau dimajukan satu hari. Jadi kalender tidak sesuai dengan agama. Muhammadiyah tidak mau seperti itu, karena dapat menimbulkan

³⁷ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

³⁸ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

dualisme dalam arti, pada satu sisi kalender dipakai, namun pada sisi lain kalender tersebut tidak berlaku. Muhammadiyah tidak menginginkan hal seperti ini karena dapat menimbulkan perpecahan, yang diinginkan adalah kepribadian umat Islam harus bulat tanpa adanya dualisme, dalam arti bisa menerima sesuatu secara bulat (misal: saya bisa menerima kalender ini secara agama dan secara dunia).³⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa Muhammadiyah hakikatnya menginginkan persatuan dan kesatuan yang kuat di kalangan umat Islam. Persatuan dan kesatuan ini tidak hanya di kalangan muslim Indonesia, akan tetapi muslim di seluruh dunia. Apa yang terjadi selama ini adalah bahwa umat Islam sering berbeda pendapat dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan atau 1 Syawwal, yang penetapannya baru dilakukan beberapa jam menjelang tanggal tersebut muncul. Idealnya harus ada penanggalan yang dapat diterima oleh umat Islam secara keseluruhan di berbagai belahan dunia, yaitu penanggalan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademik serta dapat pula dipertanggung jawabkan secara agama di hadapan Allah.

c. Bidang Advokasi Publik/Sosial

Dalam bidang ini Muhammadiyah melakukan banyak hal, terutama yang terkait dengan hak-hak masyarakat secara umum. Advokasi di sini adalah memberikan pembelaan terhadap rakyat yang hak-hak mereka dirampas baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan swasta. Advokasi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka, yaitu hak untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara baik dan benar. Sementara melalui bidang sosial, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain, seperti pendirian panti asuhan, rumah bersalin dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

Terkait dengan advokasi, dapat dikatakan Muhammadiyah sebagai satu-satunya organisasi Islam yang peduli dan bersedia melakukan review terhadap beberapa undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, kenyataannya Muhammadiyah menang dan berhasil. Misalnya review tentang Undang-Undang Sumber Daya Alam, di mana terdapat beberapa pasal dibatalkan karena dianggap merugikan rakyat. Inilah dakwah dan tajdidnya Muhammadiyah. Hal ini dilakukan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, utamanya warga Muhammadiyah dan tidak bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jika undang-undang diganti, rakyat tidak bisa secara langsung merubah. Apa yang

³⁹ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

tidak bisa dilakukan oleh rakyat secara langsung bisa diambil alih oleh Muhammadiyah dan berhasil. Hal inilah yang dikatakan sebagai tajdid dalam berdakwah Muhammadiyah. Siapa yang berpandangan bahwa datang ke Mahkamah Konstitusi adalah dakwah, siapa yang berpandangan bahwa membangun rumah sakit dakwah. Jadi, inilah nilai-nilai modernitas dakwah organisasi Muhammadiyah.⁴⁰

Salah bentuk advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks ke-Acehan, dapat dilihat dalam keterlibatannya saat menyusun dan mengawasi jalannya perundang-undangan di Aceh. Dapat dikatakan bahwa hanya Muhammadiyah yang terlibat secara langsung. Contoh konkritnya, melalui Universitas Muhammadiyah yang terlibat di dalam memberikan saran-saran tertulis di dalam penetapan qanun-qanun Syari'at Islam di Aceh. Bahkan di Qanun Acara Jinayat, hampir 20% berasal dari usul Universitas Muhammadiyah, tapi tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat karena jika diinformasikan malah bisa ditolak. Jika diketahui masyarakat bahwa hal itu diusul oleh Muhammadiyah, ada kemungkinan akan ditolak. Dalam prosesnya, pimpinan Universitas Muhammadiyah datang ke kantor DPR dan menyerahkan bahan tertulis kepada ketua atau salah seorang pimpinan yang selanjutnya diserahkan kepada panitia. Setelah dimusyawarahkan, kenyataannya tidak ada satupun usul tertulis dari Universitas Muhammadiyah yang ditolak. Kiranya, tidak ada satu organisasi pun di Aceh yang memberikan usul konkrit seperti itu. IAIN sendiri tidak melakukannya, dalam arti secara resmi lembaganya tidak melakukannya, walaupun orang-orangnya ada, akan tetapi Universitas Muhammadiyah, khususnya Fakultas Hukum telah melakukannya. Usul Universitas Muhammadiyah pada qanun jinayat juga ada, namun tidak sebanyak pada qanun acara jinayat. Begitu pula pada qanun pengamalan syari'at Islam, atau Qanun No. 8 walaupun hampir semua ditolak, atau tidak diterima. Namun secara lobi personal, beberapa pasal dalam qanun tersebut yang diusul oleh Muhammadiyah ditampung dan diterima, walaupun tidak secara resmi tertulis, terutama beberapa ayat yang terdapat dalam qanun 14 dan 15 tentang pengamalan syari'at Islam, merupakan hasil lobi dari beberapa orang Muhammadiyah.⁴¹

d. Bidang Dakwah

Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi dakwah, karena Muhammadiyah melakukan dakwahnya melalui semua lembaga yang dimiliki,

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Alyasa Abu Bakar, pada tanggal 13 Agustus 2015.

seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, atau melalui ide-ide pembaharuan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sebagai gerakan Islam yang mengemban visi keislaman moderat, Muhammadiyah juga berperan sebagai organisasi dakwah untuk menyebarkan paham keagamaannya kepada umat Islam. Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memiliki relevansi dengan konteks historis pada waktu berdirinya. Disebabkan oleh kondisi pemahaman dan praktik keislaman umat Islam pada waktu itu yang dipandang telah menjauhi ajaran-ajaran murni, maka merupakan kewajiban bagi Muhammadiyah untuk meluruskannya. Salah satu metode untuk menyampaikan pandangan-pandangan keislaman murninya itu melalui dakwah, sehingga gerakan Muhammadiyah memiliki identitas sebagai gerakan dakwah.

Secara organisatoris, peran dan fungsi dakwah Muhammadiyah diamanatkan kepada Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) sebagai salah satu majelis pembantu Pimpinan Pusat untuk menjalankan program-program *dakwah Islamiyah*. Namun, peran dan fungsi MTDK di Aceh telah banyak di susupi dan didominasi oleh pemahaman Islam yang eksklusif. MTDK di Aceh kemudian menjadi sarang bagi kelompok berhaluan konservatif dalam beraqidah dan mengalami kristalisasi ideologi. Akibatnya, fungsi MTDK hanya mengenalkan salah satu wajah paham keislaman di Muhammadiyah yang eksklusif.⁴²

Oleh karena itu, untuk memperkecil masalah ini, beberapa pengurus Muhammadiyah di beberapa wilayah kerap memebrikan pemahaman dan pembekalan bagi kader-kadernya. Sebagai contoh, seperti di Rumah Sakit Muhammadiyah Yokyakarta, mereka memberikan pengajian mingguan khusus kepada karyawan. Dulu di Universitas Muhammadiyah Aceh sendiri kegiatan tersebut pernah dilakukan, yaitu pengajian kepada karyawan yang dilaksanakan sebulan sekali, guna menyatukan visi, misi Muhammadiyah dan sebagainya. Di Universitas Muhammadiyah Aceh, ada yang namanya Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah, lembaga inilah yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan seperti ini. Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah selain bertugas untuk hubungan keluar (kerja sama), juga mengurus masalah al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan demikian di Universitas Muhammadiyah bukan Tri

⁴²Mu`arif, *Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hal. 289-291.

Dharma Perguruan Tinggi, melainkan *Catur Dharma*, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, serta al-Islam Kemuhmadiyah.⁴³

Kegiatan ini penting dilakukan guna memberikan apa sebenarnya Muhammadiyah, bagaimana jati diri dan ciri-ciri perjuangannya. Sebagaimana tersirat di dalam Anggaran Dasar bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, Muhammadiyah terbagi atas tiga hal, yaitu: sebagai gerakan Islam, dakwah Islam dan *Tajdid*. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam (masyarakat utama) yang adil, makmur, dan diridhai Allah.⁴⁴

Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha, yang diwujudkan dalam amal usaha, program dan kegiatan perserikatan. Organisasi menjadi salah satu unsur terpenting dari gerakan Muhammadiyah. Seluruh program kerja dan amal usaha Muhammadiyah seluruhnya diarahkan dengan satu tujuan yaitu hanya untuk dakwah Islam, amar makruf nahi mungkar. Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai Tingkat Tinggi (Perguruan Tinggi) hanya untuk dakwah. Mendirikan Rumah Sakit dan lembaga-lembaga sosial semuanya hanya untuk tujuan dakwah.⁴⁵

Pada awal berdirinya, dakwah yang dijalankan Muhammadiyah dilakukan melalui dakwah mimbar. Dakwah mimbar adalah gerakan pencerahan yang dijalankan oleh K. H. Ahmad Dahlan ini pada giliran kemudiannya melahirkan kader-kader (mubaligh-mubaliqh) Muhammadiyah. Kader-kader mubaligh Muhammadiyah inilah yang kemudian menyebarkan pikiran-pikiran Muhammadiyah ke seluruh pelosok tanah air. Pikiran-pikiran Muhammadiyah dituangkan dalam beberapa bentuk amal usaha. Selain amal usaha, juga dilakukan kajian-kajian mingguan dan bulanan guna mencerdaskan umat, yang kemudian dipublikasi dalam Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah. Bahkan dahulu Muhammadiyah mempunyai surat kabar *Suar* yang terbit di Yogyakarta, namun kemudian karena alasan kekurangan dana berhenti. Sekarang Muhammadiyah sudah berumur lebih satu Abad, begitu juga dengan buletin Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah tersebut.⁴⁶

⁴³ Hasil wawancara dengan Aslam Nur, pada tanggal 15 Agustus 2015.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Muharrir Asy`ary, pada tanggal, 11 Agustus 2015.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Muharrir Asy`ary, pada tanggal, 11 Agustus 2015.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Imam Syuja`, pada tanggal 15 Agustus 2015.

Dakwah mimbar ini terus dipertahankan pada masa-masa awal, terutama pada masa Kepemimpinan K. H. Ahmad Dahlan sampai dengan K. H. A Azhar Basyir, namun pada kepemimpinan selanjutnya terutama pada masa kepemimpinan Amin Rais, Syafi'i Ma'arif dan Din Syamsuddin, dakwah mimbar ini sedikit bergeser pada *dakwah bil hal*. Memang kajian-kajian bulanan tetap ada, begitu pula dengan Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah. Bahkan hari ini Muhammadiyah sudah memiliki radio dan tv, namun hari ini semuanya lebih berkonsentrasi pada penguatan organisasi.⁴⁷

Bentuk dakwah bil hal adalah, seperti adanya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, adanya lembaga-lembaga sosial, seperti rumah sakit, panti asuhan, masjid-masjid, baitul qirat, radio, TV MU, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah ini merupakan tempat pengkaderan, bagi kader-kader Muhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁸

Nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah Muhammadiyah juga dapat dilihat dari media yang digunakannya, yaitu: menggunakan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun dalam konteks ke-Acehan hal ini tidak begitu terlihat dibanding dengan daerah lain.⁴⁹

e. Bidang Ekonomi

Bagi Muhammadiyah, keberadaan Baitul Qirat, juga bagian dari kemoderenan. Saat ini umat Islam apakah sanggup membuat sebuah lembaga keuangan yang bisa untung dan tidak rugi. Sebagai contoh, simpan pinjam, selama ini para petani mendapat modal dari siapa? Jika bank tidak mengeluarkan modal, darimana mereka mendapatkan modal? tentu dari bank konvensional. Muhammadiyah memulainya dari simpan pinjam, walaupun sampai sekarang belum menguntungkan -- termasuk koperasi, akan tetapi Muhammadiyah terus mencoba dan membenahinya. Bahwa ada kelompok lain yang lebih maju dan mampu membuat bank, seperti baitul qirat, atau bank syariah diluar pemerintah, namun itu sifat masih pada tingkat lokal dan belum mampu beroperasi pada tingkat nasional. Jadi belum ada baitul qirat yang mampu dan mempunyai jaringan sebagaimana sebuah organisasi yang mapan secara nasional di luar pemerintah. Dalam hal ini Muhammadiyah sudah mampu membuat secara

⁴⁷Hasil wawancara dengan Imam Syuja', pada tanggal 15 Agustus 2015.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Imam Syuja', pada tanggal 15 Agustus 2015.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Muharrir Asy'ary, pada tanggal, 11 Agustus 2015.

nasional, walaupun belum begitu bagus dan menguntungkan. Hal inilah kemodrenan Muhammadiyah dalam gerakan ekonominya.⁵⁰

3. Faktor Penghambat Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah di Aceh

Di antara tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah Aceh dalam menjalankan gerakannya terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, masih lemahnya pemahaman kader-kader tentang ideologi kemuhammadiyah, ke-Islaman, dan lemahnya kemampuan berkomunikasi hingga tidak mampu berkomunikasi dan membaca apa yang diinginkan oleh masyarakat. Secara umum, tantangan yang datang dari faktor ekstern di antaranya: ekonomi umat yang masih lemah dan rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat disebabkan lemahnya pemahaman agama dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih jauh, tantangan dakwah yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah di Aceh juga sangat terkait: *Pertama*, benci roman -- masyarakat merasa alergi ketika mendengar apapun tentang Muhammadiyah. Benci roman ini muncul karena kesalahan persepsi yang kemudian tanpa mau klarifikasi dan kemudian muncul klaim dan menganggap Muhammadiyah sesat, misalnya dengan mengatakan Muhammadiyah tidak qunut, dan sebagainya. *Kedua*, Muhammadiyah dalam berdakwah jelas pegangannya, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun dalam pelaksanaan dan pengamalannya kadang-kadang menabrak tradisi, sesuatu yang hidup dan sudah mapan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tentang nazar di kuburan, zikir secara ramai-ramai, sehingga kerap menabrak tradisi yang sudah mapan. Muhammadiyah dalam berdakwah jelas, menyampaikan kebenaran apa adanya walaupun pahit. Sekarang ini orang-orang mengamalkan ajaran Islam karena banyak dilakukan orang, bukan berdasarkan ilmu. Di Muhammadiyah, mengamalkan ajaran Islam apa adanya, apa yang menjadi tuntunan al-Qur'an dan sunnah.⁵¹

Faktor-faktor di atas merupakan di antara faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya Muhammadiyah di Aceh. Faktor-faktor tersebut baik secara langsung atau tidak ikut mempengaruhi perkembangan gerakan dakwah Muhammadiyah di Aceh.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Alyasa Abu Bakar, MA, tanggal 13 Agustus 2015.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Muharrir Asy'ary, pada tanggal, 11 Agustus 2015.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*: bahwa internalisasi nilai-nilai modernitas dalam dakwah Muhammadiyah Aceh dilakukan melalui semua kegiatan amal usahanya, seperti melalui bidang pendidikan, pemikiran, dakwah, sosial, advokasi, dan lainnya. *Kedua*, dalam melakukan tugas-tugas dakwahnya di Aceh, Muhammadiyah mengalami sejumlah hambatan baik hambatan yang sifatnya internal maupun eksternal.

Sebagai rekomendasi, *pertama*, diharapkan kepada pengurus dan warga Muhammadiyah agar dapat menjalin komunikasi dengan cara yang lebih baik dengan masyarakat secara luas agar terjalin hubungan yang harmonis sesama muslim. *Kedua*, diharapkan kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan agar lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak dan meningkatkan ilmu pengetahuan baik melalui bacaan atau berdiskusi agar tidak mudah memberikan penilaian yang negatif kepada pihak lain yang berbeda dengan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jainuri. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2002.
- Ahmad Syafii Maarif. *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*. Yogyakarta: Sypress, 1990.
- Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Deliar Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Endang Saifuddin Anshari. *Wawasan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Fazlur Rahman. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Hassan Su'ud, M. *Kontribusi Muhammadiyah Bagi Pembangunan Daerah Istimewa Aceh*, dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*.
- James L. Peacock. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam*. Jakarta: Cipta Kreatif, 1986.
- Mitsuo Nakamura. *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Institute of Southeast Asian Studies, 1983.
- Mu`arif. *Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka progressif, 1997.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Ke-37 Muhammadiyah Aceh*. Banda Aceh: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, 2010.
- Ris`an Rusli. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusdi Sufi. *Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik Pada Masa Kolonial di Aceh*, dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. Banda Aceh; Gua Hira`, 1995.
- Syahrin Harahap. *Islam dan Modernitas*. Jakarta: Prenada, tt.
- Syaifullah. *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Syarifuddin Jurdi. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Weinata Sairin. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.